



## Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

### Pengaruh Kemandirian Keuangan Dan Ketergantungan Fiskal Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023

Listy Alfianty<sup>1</sup>, Ira Novianty<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> *Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Jalan Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia*

\*Korespondensi: [ira.novianty@polban.ac.id](mailto:ira.novianty@polban.ac.id)

Volume 18  
Nomor 1  
Halaman 76-84  
Pekanbaru, Desember 2024 - Mei 2025

Tanggal Masuk:  
29 April 2025  
Tanggal Revisi:  
04 Juni 2025  
Tanggal Diterima:  
13 Juni 2025

Kata kunci:

Kemandirian keuangan,  
ketergantungan fiskal, laju  
pertumbuhan ekonomi,  
otonomi daerah

Mengutip ini sebagai:

Alfianty, L., & Novianty, I. (2025). Pengaruh kemandirian keuangan dan ketergantungan fiskal terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2021–2023. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 18(1), 76–84.

#### ABSTRAK

**Tujuan Utama** - Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh kemandirian keuangan daerah dan ketergantungan fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada perspektif keuangan daerah..

**Metode** - Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif melalui pendekatan Common Effect Model (CEM) dengan pengolahan data dilakukan menggunakan Eviews 13.

**Temuan Utama** - Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh positif antara kemandirian keuangan dan ketergantungan fiskal, baik secara parsial maupun simultan. Sepanjang periode penelitian, peningkatan kemandirian keuangan tercermin dari semakin banyaknya daerah yang mampu meningkatkan sumber pendapatannya secara mandiri.

**Implikasi Teori dan Kebijakan** - Namun, mengingat terbatasnya potensi dan sumber pendapatan di sejumlah daerah, maka dana transfer masih diperlukan untuk menstimulus kesinambungan pembangunan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa keseimbangan PAD dan dana transfer mampu mendukung keberlangsungan otonomi daerah apabila dikelola secara efektif untuk memenuhi kebutuhan lokal.

**Kebaruan Penelitian** – Studi ini secara khusus memberikan wawasan kualitatif terhadap Kemandirian Keuangan Dan Ketergantungan Fiskal Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 yang belum diteliti sebelumnya.

#### ABSTRACT

**Main Purpose** - This study aims to examine the effect of regional financial independence and fiscal dependence in supporting economic growth with a focus on the regional financial perspective.

**Method** – The method used is a descriptive quantitative approach through the Common Effect Model (CEM) approach with data processing using Eviews 13.

**Key Findings** – The results of the analysis show a positive effect between financial independence and fiscal dependence, both partially and simultaneously. Throughout the study period, the increase in financial independence was reflected in the increasing number of regions that were able to increase their sources of income independently.

**Theoretical and Policy Implications** – However, given the limited potential and sources of income in a number of regions, transfer funds are still needed to stimulate the continuity of development and accelerate regional economic growth. This finding shows that the balance of PAD and transfer funds can support the sustainability of regional autonomy if managed effectively to meet local needs.

**Research Novelty** – This study specifically provides qualitative insights into Financial Independence and Fiscal Dependence on the Rate of Economic Growth of Regencies/Cities in West Java Province in 2021-2023 which have not been previously studied.

## PENDAHULUAN

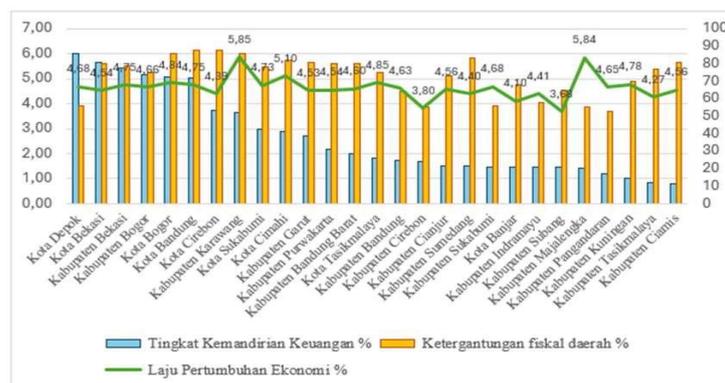
Kewenangan setiap daerah untuk mengelola keuangan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri telah diatur dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2014, di mana daerah otonom memiliki peran dalam mendorong kemajuan daerahnya masing-masing yang tercermin dari kemandirian dan minimnya kesenjangan antar daerah (Rinova & Dewi, 2019). Namun pada kenyataannya, kesenjangan ekonomi masih menjadi persoalan yang mencolok, seiring belum meratanya pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Untuk menggambarkan kondisi suatu daerah dalam menilai sumber daya ekonomi, maka nilai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menjadi salah satu alat ukur untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Dinamika pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya ketimpangan, di mana sebagian daerah mampu tumbuh pesat sementara daerah lainnya mengalami keterlambatan. Fenomena ini berkaitan erat dengan perbedaan kapasitas daerah dalam memperoleh dan mengelola sumber daya keuangan (Rustendi, 2021).

Kemandirian keuangan daerah memegang peranan penting dalam memperkuat kapasitas daerah guna mendanai pembangunan, melakukan investasi, serta meningkatkan pelayanan publik (Mahmudi, 2019). Di sisi lain, ketika daerah diberi kewenangan untuk menggali potensi keuangannya secara mandiri, hal ini masih menjadi tantangan bagi sejumlah daerah karena sering kali mengalami keterbatasan dalam menggali sumber pendapatan, terutama pada sektor pajak dan retribusi. Akibatnya, banyak daerah masih memerlukan aliran dana dari pemerintah yang lebih tinggi untuk menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahannya (Oates, 1999). Wardani & Sutrisna (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan

lebih mudah dicapai oleh sejumlah daerah yang berada pada tingkat kemandirian keuangan yang tinggi. Oleh sebab itu, optimalisasi PAD dipandang menjadi strategi penting dalam memperluas ruang bagi daerah untuk terus mengembangkan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui perencanaan yang matang dan alokasi dana yang efisien, PAD dapat menunjang peningkatan produktivitas sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang nantinya akan menghasilkan nilai tambah terhadap PDRB (Prakoso et al., 2019; Siregar & Panggabean, 2021).

Sementara itu, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer menghadirkan tantangan tersendiri. Meskipun dana transfer seperti dana perimbangan, dana insentif, dan bantuan keuangan dirancang sebagai instrumen pendukung dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemanfaatannya tetap dibatasi oleh formula dan ketentuan tertentu yang ditetapkan dalam regulasi. Hal ini berpotensi membatasi fleksibilitas daerah dalam merancang kebijakan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Meskipun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa alokasi dana transfer tetap memiliki kontribusi penting, terutama bagi daerah yang masih memiliki kapasitas fiskal rendah. Dana transfer dapat berperan sebagai sumber pembiayaan tambahan yang membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkecil kesenjangan fiskal antarwilayah, serta memperkuat kemandirian daerah secara bertahap (Badan Kebijakan Fiskal, 2021; Ratnawati & Sari, 2023).

Menariknya, di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat, daerah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan rendah justru mampu mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi yang sebanding, bahkan melebihi daerah yang secara fiskal lebih mandiri, seperti yang terlihat dalam persentase dibawah ini.



Gambar 1. Rata-rata tingkat kemandirian keuangan, ketergantungan fiskal dan laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2021 - 2023

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kemandirian keuangan dan ketergantungan fiskal berkontribusi lebih baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa masing-masing variabel tersebut belum

Berdasarkan hasil penelitian Akbar (2024); Prakoso et al., (2019); Ratnawati & Sari (2023); dan Sofilda et al., (2023), menunjukkan bahwa kemandirian keuangan memiliki pengaruh positif, sedangkan menurut Siregar & Panggabean (2021); Wardani & Sutrisna (2019) kemandirian keuangan dan ketergantungan menunjukkan hasil pengaruh negatif, sementara penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Anwar (2024) ketergantungan memberikan hasil pengaruh positif, namun ketergantungan akan berpengaruh negatif jika tingkat kemandirian kurang dari 50% (Sofilda et al., 2023). Menurut Maryanti et al., (2023); Sawitri et al., (2020); dan Sumardjoko, (2019a) memberikan hasil tidak adanya pengaruh. Namun, secara bersamaan kemandirian dan ketergantungan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Siregar & Panggabean, 2021; Sumardjoko, 2019). Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu yang masih menunjukkan hasil temuan yang belum konsisten, maka penulis merefleksikan kemungkinan hipotesis dua arah yang dirumuskan sebagai berikut:

H1: Tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi  
 H2: Ketergantungan fiskal berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi  
 H3: Kemandirian keuangan daerah dan ketergantungan fiskal secara simultan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi  
 Perumusan hipotesis ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika dari setiap masing-masing variabel penelitian, yang nantinya hasil penelitian akan memberikan pemahaman terhadap dinamika efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal yang telah berlangsung selama dua dekade terakhir ini.

**METODE**

sepeenuhnya mencerminkan pola yang konsisten dengan teori-teori yang ada, serta masih menyisakan ruang untuk dieksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh keduanya dalam mendukung peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Analisis regresi data panel digunakan pada penelitian ini dengan mempertimbangkan tiga pendekatan, yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* (Basuki & Prawoto, 2017). Pemilihan model terbaik akan dilakukan melalui serangkaian uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, dengan bantuan perangkat lunak EViews 13 sebagai alat analisis data. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh terhadap seluruh 27 kabupaten dan kota Jawa Barat selama tahun 2021-2023. Pemilihan teknik ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlah populasi masih dalam batas yang memungkinkan untuk dianalisis secara menyeluruh, sehingga dapat menghasilkan informasi yang komprehensif dan representatif. Adapun variabel (X1) diukur menggunakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dana eksternal (transfer dan pinjaman daerah), (X2) diukur melalui rasio antara pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah dan (Y) di dasarkan pada perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di setiap tahunnya atas dasar harga konstan. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yang bersumber dari data sekunder meliputi, realisasi APBD yang telah diaudit dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), data PDRB atas dasar harga konstan dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta data lainnya yang dikumpulkan melalui internet, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk memperoleh pemahaman dan informasi dari masing-masing variabel yang diteliti, dilakukan analisis statistik deskriptif yang di sajikan dalam penjelasan dibawah ini.

	KKD	KF	LPE
Mean	0.380799	0.729869	0.046358
Median	0.259200	0.770600	0.050000
Maximum	0.897600	0.902300	0.097600
Minimum	0.105200	0.504200	0.005800
Std. Dev.	0.246051	0.114061	0.011723
Observations	81	81	81

Gambar 1. Statistik Deskriptif

Pada variabel kemandirian keuangan daerah (KKD) menunjukkan nilai maksimum sebesar 0,897600 terjadi pada Kota Depok tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Depok telah memiliki kapasitas keuangan yang baik untuk menjalankan otonomi daerah dengan pola hubungan “delegatif”, di mana pemerintah pusat sudah sangat minim dalam keterlibatan urusan pemerintahan Kota Depok, sedangkan nilai minimum 0,105200 tercatat pada Kabupaten Tasik tahun 2023 dengan pola hubungan “intruktif”. Hal ini disebabkan oleh lemahnya optimalisasi pendapatan daerah yang terlihat dari penetapan target PAD yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya serta rendahnya pemungutan retribusi daerah yang hanya mencapai sekitar 60%. Secara keseluruhan, kemandirian keuangan daerah menunjukkan hasil mean sebesar 0,380799, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Barat tergolong dalam kategori hubungan “konsultatif”, artinya intervensi dari pemerintah pusat mulai berkurang, namun daerah belum sepenuhnya mampu dalam mengelola keuangannya secara mandiri. Sementara nilai standar deviasi sebesar 0,114061.

Ketergantungan fiskal (KF) menunjukkan nilai median sebesar 0,770600 yang terselenggara pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2023. Sementara itu, nilai maksimum terjadi pada Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2023 dengan nilai 0,902300. Menurut Nandar (2023) melalui radartasik.com Kondisi ini di sebabkan karena masih banyaknya titik aset yang di anggap berpotensi, tetapi belum dilakukan pengelolaan, sehingga Kabupaten Tasikmalaya

masih memiliki kebergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer. Sementara itu, nilai minimum sebesar 0,504200 terjadi pada Kota Depok di tahun 2021. Hal ini mencerminkan bahwa Kota Depok mampu menyeimbangkan kapasitas daerahnya sendiri, di mana kebutuhan terhadap dana transfer hanya mencapai 50% dari total anggaran dan nilai mean adalah 0,729869, di mana daerah di Jawa Barat masih di dominasi oleh tingginya ketergantungan fiskal sebesar 72%.

Analisis pada laju pertumbuhan ekonomi (LPE), menunjukkan nilai median sebesar 0,050000 terjadi pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2023. Nilai maksimum sebesar 0,097600 dicapai oleh Kabupaten Indramayu yang berupaya melakukan penguatan terhadap potensi unggulan, seperti peningkatan produktifitas padi yang menjadikan Kabupaten Indramayu di nobatkan sebagai daerah dengan produksi padi terbesar se-Indonesia (Redaksi, 2023). Strategi ini telah membuahkan hasil pada tahun 2023, di mana pada tahun 2021 Kabupaten Indramayu sempat mencatat laju pertumbuhan minimum sebesar 0,005800. Secara keseluruhan, nilai mean pada laju pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0,046358.

### Pemilihan Model Dalam Analisis Regresi Data Panel

#### Uji Chow

Untuk melakukan pemilihan model, uji chow merupakan langkah awal untuk mengestimasi model terbaik diantara CEM dengan FEM.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FEM			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.944316	(26,52)	0.5514
Cross-section Chi-square	31.325084	26	0.2164

Sumber: Hasil Eviews 13

Berdasarkan tabel 2, data menunjukkan bahwa sebesar 0,5514 dari nilai probabilitas F lebih tinggi dibandingkan tingkat signifikansi, yaitu ( $0,5514 > 0,05$ ), sehingga keputusan ditetapkan untuk menerima  $H_0$  yang

mengindikasikan bahwa model CEM merupakan pilihan yang tepat dibandingkan FEM.

#### Uji Hausman

Setelah uji chow dilakukan, tahap selanjutnya adalah melakukan uji hausman untuk

menentukan model terbaik antara REM dan FEM seperti yang dijelaskan di bawah ini.

**Tabel 3. Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: REM  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.704026	2	0.0017

Sumber: Hasil Eviews 13

Berdasarkan hasil pengujian diatas, tercermin bahwa sebesar 0,0017 dari nilai probabilitas F memberikan hasil yang lebih rendah dari tingkat signifikansi, yaitu ( $0,0017 < 0,05$ ), sehingga keputusan diperoleh untuk menerima  $H_0$  dan REM dinyatakan sebagai model yang paling sesuai.

### Uji Lagrange Multiplier

Pengujian LM test diperlukan sebagai langkah akhir untuk memastikan pemilihan model yang sesuai dan konsisten dalam pengujian penelitian. Dalam kondisi ini LM test digunakan untuk membandingkan antara model CEM dengan REM.

**Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier**

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects  
Null hypotheses: No effects  
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	3.631210 (0.0567)	126.5538 (0.0000)	130.1851 (0.0000)

Sumber: Hasil Eviews 13

Hasil tabel 4 menunjukkan bahwa nilai breusch-pagan sebesar 0,0567 melebihi tingkat signifikansi 5%, sehingga Keputusan ditetapkan untuk menerima  $H_0$  atau model CEM merupakan pilihan yang tepat. Berdasarkan serangkaian pengujian terhadap ketiga pendekatan pemilihan model regresi, maka hasil akhir dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menetapkan model CEM sebagai model yang paling sesuai untuk digunakan yang juga dikenal sebagai *pooled least squares*.

Model CEM mengasumsikan karakteristik data bersifat relatif atau homogen antar unit maupun antar waktu. Oleh karena itu, pemilihan model CEM menjadi pilihan terbaik karena mampu merepresentasikan hubungan antar variabel secara sederhana tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik

masing-masing unit pengamatan dalam menentukan keputusan hasil penelitian.

### Uji Asumsi Klasik

Setelah diperoleh hasil pemilihan model, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian asumsi klasik. Dalam penelitian regresi data panel, pengujian asumsi klasik secara menyeluruh tidak selalu diperlukan. sehingga penelitian ini hanya meliputi uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas (Basuki & Prawoto, 2017; Napitupulu et al., 2021).

### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi ketidakkonsistenan varians residual dalam suatu model regresi selama periode pengamatan. Suatu model dianggap baik apabila residualnya

memiliki varians yang konstan atau dikenal dengan istilah homoskedastisitas.

**Tabel 5. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity			
	0.1256		0.882
F-statistic	98	Prob. F(2,78)	1
Obs*R-squared	0.2602	Prob. Chi-Square(2)	0.878
Scaled explained SS	0.3205	Prob. Chi-Square(2)	0.851
	55		9

Sumber: Hasil Eviews 13

Dari hasil pengujian diatas dapat ditunjukkan bahwa sebesar 0,8780 dari nilai probabilitas chi-square lebih tinggi dari tingkat signifikansi, yaitu (0,8780 > 0,05) dan

mencerminkan tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi yang diterapkan telah memenuhi ketentuan homoskedastisitas.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 6. Hasil Pengujian Multikolinearitas**

	KKD	KF
KKD	1.000000	-0.905611
KF	-0.905611	1.000000

Sumber: Hasil Eviews 13

Berdasarkan analisis pada tabel 6, nilai koefisien korelasi pada masing-masing variabel x berada di bawah nilai 0,85. Temuan ini mengindikasikan bahwa model penelitian ini tidak mengandung gejala multikolinearitas.

### Hasil Pengujian Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan pendekatan regresi data panel yang diterapkan dalam penelitian ini, *common effect* dipilih sebagai dasar dalam pengambilan keputusan analitis. Persamaan regresi data panel yang dihasilkan melalui model tersebut disajikan dibawah ini:

$$Y = -0.009657 + 0.030503 \text{ KKD} + 0.060832 \text{ KF}$$

Hasil analisis regresi menggambarkan bagaimana perubahan dalam kemandirian keuangan daerah (KKD) serta ketergantungan fiskal (KF) dapat berkontribusi terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi (LPE) di suatu wilayah. Interpretasi hasil regresi adalah sebagai berikut:

- Setiap peningkatan KKD sebesar 1%, maka akan mendorong kenaikan LPE sebesar 0,030503 dengan asumsi variabel indepen lainnya bersifat konstan.
- Setiap peningkatan KF sebesar 1%, maka akan mendorong kenaikan LPE sebesar 0,060832 dengan asumsi variabel indepen lainnya bersifat konstan.
- Nilai konstanta menunjukkan hasil sebesar -0,009657, yang dapat dijelaskan bahwa ketika KKD dan KF tidak mengalami perubahan atau bernilai nol, maka LPE cenderung menurun sebesar -0,009657.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan berdasarkan pendekatan model *common effect* untuk mendeteksi dan mengukur sejauh mana kemandirian keuangan daerah maupun ketergantungan fiskal memberikan dampak atau pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 6. Hasil Uji Parsial**

Variable	t-Statistic	Prob.	Keputusan
----------	-------------	-------	-----------

C	-0.408961	0.6837
---	-----------	--------

KKD	2.491762	0.0148	H <sub>1</sub> diterima
KF	2.303560	0.0239	H <sub>1</sub> diterima

Sumber: Hasil Eviews 13

Berdasarkan ringkasan hasil pengujian diatas pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai t hitung lebih tinggi dari t tabel, yaitu  $2,491762 > 1,990847$  dan nilai probabilitas menunjukkan lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ( $0,0148 < 0,05$ ). Hasil pengujian membuktikan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima atau terdapatnya pengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, variabel ketergantungan fiskal juga menunjukkan hasil yang serupa, dengan t hitung lebih tinggi  $2,303560$  dibandingkan t tabel sebesar  $1,990847$ , serta nilai probabilitas  $0,0239 < 0,05$ . Hasil tersebut memperkuat keputusan untuk menerima hipotesis kedua (H2), yang menyatakan bahwa ketergantungan fiskal turut memberikan pengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, uji f atau secara bersamaan dibuktikan melalui nilai probabilitas sebesar  $0,050149$  yang masih berada dalam batas toleransi signifikan sebesar 5% ( $p \leq 0,05$ ). Sehingga, hasil dari uji f dapat memberikan kesimpulan bahwa variabel kemandirian keuangan daerah dan ketergantungan fiskal secara simultan memiliki pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

### Koefisien Determinasi

Pengujian ini menunjukkan bahwa nilai dari R-Square sebesar  $0,050120$ , yang dapat diartikan model yang digunakan masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variasi laju pertumbuhan ekonomi, di mana masih cukup jauh untuk mendekati 1. Dengan demikian, kemandirian keuangan daerah dan ketergantungan fiskal secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan sekitar 5% dari variasi laju pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, sebesar 95% menunjukkan informasi lainnya diluar model penelitian.

### Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis dari pengujian statistik yang telah dilakukan, ditemukan bahwa variabel KKD memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PAD tidak hanya mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatannya sendiri, tetapi juga memperkuat kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan kemandirian pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih fleksibel untuk mengalokasikan anggaran secara produktif, seperti melakan investasi, melaksanakan proyek pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik sebagai upaya dalam mendongkrak nilai tambah terhadap PDRB, oleh karena itu pengelolaan PAD secara bijak dan efektif dapat memperkuat fondasi ekonomi daerah (Prakoso et al., 2019; Siregar & Panggabean, 2021).

Misalnya, pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan alokasi belanja modal yang berfokus pada pembangunan infrastruktur konektivitas dan pelayanan publik yang esensial. Salah satunya adalah menyelenggarakan penguatan infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah REBANA (CaLK Provinsi Jawa Barat, 2023). Pentingnya peningkatan PAD juga ditegaskan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto dalam Khalida (2024) yang menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD. Situasi ini menekankan jika tingkat kemandirian semakin tinggi akan semakin besar pula kapasitas daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan responsif (Kusuma & Anwar, 2023). Dengan adanya ruang fiskal yang memadai, pemerintah daerah dapat menjalankan kebijakan publik secara lebih efisien dan inovatif. Tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan sistem pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, ketersediaan keuangan yang mandiri juga dapat membuka ruang inovasi dan program-program strategis guna mendukung produktivitas masyarakat. Temuan ini diperkuat oleh berbagai penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Akbar (2024); Kusuma & Anwar (2024); Prakoso et

al., (2019); Ratnawati & Sari (2023); Siregar & Panggabean (2021); dan Sofilda et al., (2023). yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan.

Dalam konteks desentralisasi fiskal dana transfer dari pemerintah menjadi salah satu bentuk dukungan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi daerah yang masih memiliki keterbatasan dalam menggali sumber pendapatannya sendiri yang bisa berdampak terhadap lambatnya perkembangan ekonomi (Sumardjoko, 2019). Di Provinsi Jawa Barat, tingkat ketergantungan fiskal kabupaten/kota masih tergolong tinggi, di mana lebih dari 70% pendanaan APBD berasal dari dana transfer. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah yang lebih tinggi masih sangat dibutuhkan dalam menopang kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah. Bahkan bagi daerah yang sudah relatif mandiri, dana transfer tetap diperlukan, mengingat adanya keterbatasan serta beragamnya potensi sumber keuangan di masing-masing wilayah.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa ketergantungan fiskal tidak selalu berdampak negatif, melainkan dapat memberikan pengaruh bagi kemajuan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Dana transfer dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pembiayaan tambahan untuk mendukung daerah dalam membiayai pembangunan, belanja daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menunjang program prioritas nasional secara lebih merata (Badan Kebijakan Fiskal, 2021; Sofilda et al., 2023). Kusuma & Anwar (2023) turut menyatakan bahwa dana transfer berperan penting dalam membiayai proyek-proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan maupun layanan dasar lainnya serta menjaga stabilitas anggaran daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi.

Penelitian ini membuktikan meskipun dana transfer yang disalurkan kepada daerah memiliki ketentuan khusus dalam penggunaannya, namun apabila pemanfaatan transfer seperti dana perimbangan, dana insentif dan bantuan keuangan telah dimanfaatkan secara efektif, maka akan memberikan peluang dalam mendorong tingkat laju ekonomi. Terutama bagi sejumlah daerah yang masih memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah, keberadaan dana transfer menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan program pembangunan. Hasil pengujian ini diperkuat dengan temuan yang

### **Ketergantungan Fiskal terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi**

dijelaskan oleh Kusuma, Anwar (2024) dan Sofilda et al., (2023), yang menjelaskan terdapatnya pengaruh positif dari ketergantungan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Artinya, dengan pengelolaan yang tepat, ketergantungan fiskal dapat menjadi instrumen yang strategis untuk mempercepat pembangunan daerah menuju peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

### **Kemandirian Keuangan Daerah dan Ketergantungan Fiskal terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Tingginya tingkat kemandirian mencerminkan kemampuan daerah dalam memperoleh dan mengelola secara optimal atas sumber-sumber pendapatannya sendiri, terutama melalui PAD. Kemandirian keuangan yang baik akan memberikan citra daerah yang mandiri dan mampu menjalankan otonomi secara optimal. Daerah yang mandiri cenderung lebih fleksibel dalam menentukan arah untuk mengatur atau mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan karakteristik lokal. Sementara itu, menurut Oates, (1999) dalam teori desentralisasi fiskal, penyerahan dana transfer kepada daerah tidak dapat dimanfaatkan secara fleksibel karena penggunaannya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab, karena setiap keputusan perlu dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kontrol dari pemerintah yang lebih tinggi. Akibatnya, peran daerah menjadi lebih pasif dan kurang responsif dalam memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat lokal.

Namun, tidak semua daerah memiliki kapasitas dan potensi yang sama, sehingga, ketergantungan fiskal memainkan peran penting sebagai penyeimbang. Dalam hal ini, adanya bantuan dana transfer pemerintah menjadi solusi agar daerah yang masih terbatas PAD-nya tetap bisa menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Menariknya, pembuktian hasil pengujian statistik mencerminkan bahwa ketergantungan fiskal mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan PAD yang tercermin dari nilai koefisien regresi yang lebih tinggi.

Keseimbangan dalam aspek finansial seperti kemandirian keuangan dan ketergantungan fiskal menjadi salah satu upaya yang juga mampu mendorong pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan. Daerah yang mampu meningkatkan PAD secara bertahap sambil tetap memanfaatkan dana transfer secara bijak akan memiliki fondasi keuangan yang kuat. Ketergantungan fiskal yang dikelola dengan baik dan proporsional tidak menjadi penghambat, tetapi justru menjadi pendukung transisi menuju kemandirian. Di Jawa Barat, kondisi ini menunjukkan perlunya sinergi yang seimbang antara upaya peningkatan kemandirian dan penggunaan dana transfer, agar setiap daerah memiliki peluang yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Temuan ini selaras dengan prinsip desentralisasi fiskal yang tidak hanya memberikan kewenangan, tetapi juga tanggung jawab kepada daerah untuk mengelola keuangannya secara efisien dan efektif. Maka dari itu, baik kemandirian keuangan daerah maupun ketergantungan fiskal memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Sumardjoko, Imam (2019) dan Siregar & Panggabean (2021).

## SIMPULAN

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa baik kemandirian keuangan daerah maupun ketergantungan fiskal secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi PAD maupun bantuan perolehan dana transfer sama-sama mampu mendorong kapasitas daerah untuk meningkatkan produktivitas setiap daerah agar terus berkembang. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketergantungan fiskal justru memberikan kontribusi lebih besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi, sebagaimana tercermin dari arah nilai koefisien regresi. Hal ini menjadi kebaruan yang menegaskan pentingnya pengelolaan dana transfer secara efektif, tidak hanya berfokus pada peningkatan PAD, dalam mempercepat pembangunan daerah.

Kekuatan dari artikel ini terletak pada penggunaan data terkini yang melibatkan seluruh daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat serta penerapan teori desentralisasi fiskal untuk menjelaskan keseimbangan antara kemandirian dan ketergantungan fiskal. Penelitian ini juga memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal tidak semata-mata menjadi hambatan, melainkan dapat berfungsi

sebagai instrumen strategis untuk mendukung pembangunan daerah dan meminimalkan kesenjangan antara daerah dan pusat. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah belum memperluas variabel lain, seperti investasi, belanja modal serta indikator non-keuangan seperti IPM dan rentang waktu penelitian ini hanya mencakup periode selama tiga tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, W. S. (2024). *Pengaruh Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018-2022)*. 1–22.
- Badan Kebijakan Fiskal, K. K. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)*. Pt Raja Grafindo Persada.
- Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
- Khalida, M. S. (2024, December 13). *Wamendagri minta Pemda tingkatkan PAD untuk dorong pertumbuhan ekonomi*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/4528738/wamendagri-minta-pemda-tingkatkan-pad-untuk-dorong-pertumbuhan-ekonomi>
- Kusuma, A. F., & Anwar, A. (2024). Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 223–233. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss2.art14>
- Laporan Realisasi Anggaran setelah audit pada Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2021-2023.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Empat. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Maryanti, S., Handra, H., & Yonnedea, E. (2023). Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 9–18.
- Nandar, U. (2023, July 21). *PAD Belum Tercapai, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Harus Optimalkan Pemanfaatan Aset*. Radartasik.Com. <https://radartasik.disway.id/read/652564/pad-belum-tercapai-pemerintah-kabupaten-tasikmalaya-harus-optimalkan-pemanfaatan-aset>
- Napitupulu, R., Hutabarat, T. P., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis Teknik dan Analisis Data dengan SPSS - STATA - Eviews (1st ed.)*. Madenatara.

- Oates, W. E. (1999). An Essay On Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 17, 1120–1149.
- Prakoso, J., Islami, F., & Sugiharti, R. (2019). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Pembangunan, 4(1). <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>
- Ratnawati, & Sari, R. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Provinsi Di Pulau Kalimantan dan Sumatera Periode 2020-2022). *Jurnal Equilibrium*, 12(2), 125–133.
- Redaksi. (2023, October 7). HUT ke-496 Kabupaten Indramayu, Mewujudkan Indramayu Tangguh, Ekonomi Tumbuh Menuju Ketahanan Pangan Mandiri. <https://indramayunews.id/2023/10/07/hut-ke-496-kabupaten-indramayu-mewujudkan-indramayu-tangguh-ekonomi-tumbuh-menuju-ketahanan-pangan-mandiri/>
- Rinova, R., & Dewi, F. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Daerah Pemekaran di Pulau Sumatera). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 24(2), 133–144.
- Rustendi, T. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pasca Pemekaran Wilayah. *Jurnal Akuntansi*, 16(1). <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- Sawitri, N. P. Y., Perdanawati, L. P., Sudiyani, N. N., & Setini, M. (2020). Local Revenue and Financial Independence on Economic Growth Through Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi Capital Expenditure. Jurnal Ekonomi*, 15(2), 320–336. <https://doi.org/10.24912/je.v25i2.683>
- Siregar, O., & Panggabean, F. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio Dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus Mebidangkorat). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 27–37.
- Sofilda, E., Zilal Hamzah, M., & Kusairi, S. (2023). Analysis of fiscal decentralisation, human development, and regional economic growth in indonesia. *Cogent Economics and Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2220520>
- Sumardjoko, I. (2019). Penguatan Kinerja Keuangan Daerah Wilayah Kepulauan dan Implikasinya terhadap Perubahan Fundamental Ekonomi Regional. *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, V, 1–23.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Wardani, P., & Sutrisna, I. K. (2019). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan IPM di Kawasan Metropolitan Sarbagita. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(6).